

055

# Polri yang Dekat dengan Masyarakat

Oleh : ATHAR

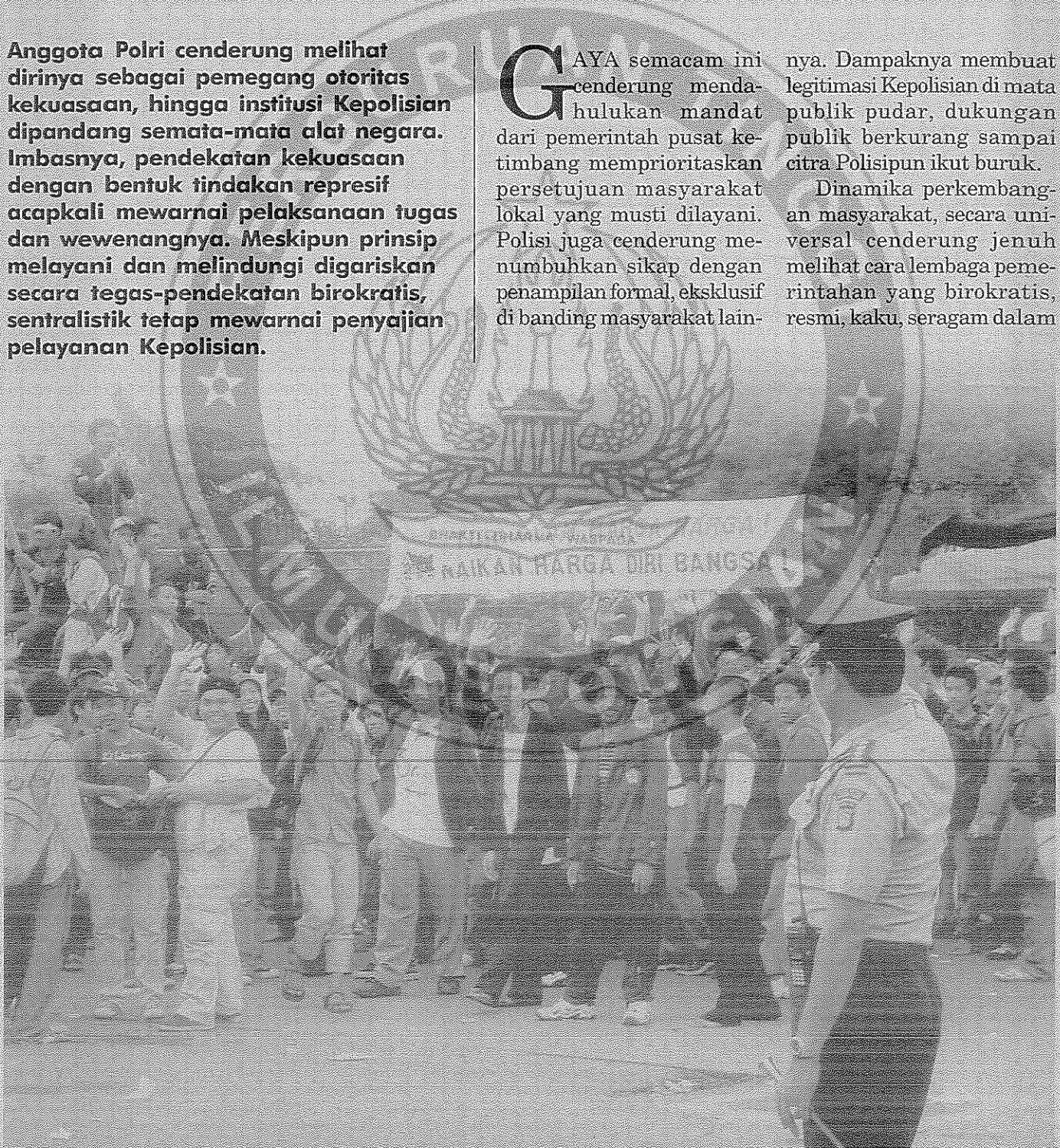
Ketua Komisi Kepolisian Indonesia (KKI)

Anggota Polri cenderung melihat dirinya sebagai pemegang otoritas kekuasaan, hingga institusi Kepolisian dipandang semata-mata alat negara. Imbasnya, pendekatan kekuasaan dengan bentuk tindakan represif acapkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Meskipun prinsip melayani dan melindungi digariskan secara tegas-pendekatan birokratis, sentralistik tetap mewarnai penyajian pelayanan Kepolisian.

**G**AYA semacam ini cenderung mendahulukan mandat dari pemerintah pusat ketimbang memprioritaskan persetujuan masyarakat lokal yang musti dilayani. Polisi juga cenderung menumbuhkan sikap dengan penampilan formal, eksklusif di banding masyarakat lain-

nya. Dampaknya membuat legitimasi Kepolisian di mata publik pudar, dukungan publik berkurang sampai citra Polisipun ikut buruk.

Dinamika perkembangan masyarakat, secara universal cenderung jenuh melihat cara lembaga pemerintahan yang birokratis, resmi, kaku, seragam dalam





menyajikan layanan publik. Artinya masyarakat menginginkan pendekatan personal, tapi cepat memecahkan masalah ketimbang terpaku dengan formalitas hukum yang kaku.

**Polmas**

Bertitik tolak dari realitas yang ada, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Ulang Tahun Polri ke 60 mencanangkan strategi baru yaitu Perpolisian Masyarakat (Polmas). Nantinya Polmas bukan lagi menjadi strategi melainkan akan jadi falsafah yang mampu menggeser paradigma konvensional menjadi satu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek melainkan sebagai mitra Kepolisian dalam memecahkan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan ketimbang proses yang formal dan prosedural.

Polmas model perpolisian yang

menekankan kemitraan sejajar antara petugas dengan masyarakat lokal. Ruang geraknya menyelesaikan dan mengatasi setiap masalah sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, ketentraman masyarakat untuk mengurangi kejahatan, dan rasa ketakutan.

Lebih rincinya, masyarakat ikut berkiprah tidak lagi menjadi obyek dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian, perannya sebagai subyek yang menentukan pengelolaan lingkungan aman, tertib untuk ketentraman, keselamatan yang di fasilitasi oleh petugas Kepolisian sebagai mitra.

Walhasil, nantinya akan menjelma sekaligus tumbuh berkembangnya pengelolaan keamanan dan ketertiban dengan landasan norma-norma sosial ditambah kesepakatan local dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Forum kemitraan Polisi dengan masyarakat ini nantinya diharap-

kan akan tumbuh berkembang dikawasan pemukiman ini merupakan pranata yang bersifat otonom dalam mengambil langkah pemecahan masalah antara lain penyelesaian konflik antar warga, dengan pejabat setempat atau Polisi, serta menanggulangi kejahatan, mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan. Penempatan anggota Polisi di kawasan itu sifatnya permanen jangka waktunya cukup lama tujuannya agar petugas Polisi itu bisa menjalin kemitraan dengan masyarakat di wilayahnya.

Langkah besar yang diterobos Kapolri Jenderal Sutanto ini bukan sekedar fenomena saja melainkan diwujudkan dengan dibarengi pengucuran dana ke 4.292 Polsek sebesar Rp 1juta. Jadi Polsek akan melaksanakan strategi ini dengan modal awal nantinya Polsek akan memperoleh dana sebesar Rp 250.000,- setiap bulannya. Artinya, Bintara yang menjalin kemitraan ini bisa meminum kopi atau





makan kue bersama masyarakat dengan modal dari Kapolri tersebut. Selama ini Bintara-bintara tersebut tidak memperoleh anggaran semacam itu.

Selain anggaran tersebut, Bintara yang menjalin kemitraan ini akan memperoleh perlengkapan, sepeda motor, alat tulis, alat komunikasi. Bintara Polmas ini sehari-harinya duduk setara dengan anggota masyarakat di desa-desa yang jumlahnya sekitar 70.000. Setiap hari bintara tersebut memberikan pemahaman tentang hukum, peraturan-peraturan yang kedua perangkat inilah resultan dengan masalah keamanan.

Artinya dengan perlengkapan itu, jika di Desa (dimana masyarakatnya sudah faham dengan hukum, peraturan dan faham akan hak dan kewajibannya) ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi misalnya keributan atau tindak pidana maka mereka akan dengan mudah menghubungi bintara Polmas tadi. Sepanjang keributan itu bisa diselesaikan oleh anggota masyarakat tersebut, jika ternyata meluas maka Bintara tersebut minta bantuan Polsek. Lain halnya dengan kasus kriminal, masyarakat serta merta akan menyerahkan pelaku pada Bintara Polmas yang kemudian kasusnya diangkat ke Polsek.

Kerjasama antara Polisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan menjadikan masyarakat adalah Polisi dan anggota Polri yang menjadi mitra itu juga masyarakat artinya duduk sama rendah berdiri sama tinggi untuk memecahkan masalah.

Fenomenanya akan terlihat dengan nyata Polisi bukan satu-satunya instansi yang harus menangani masalah-masalah hukum dan ketertiban, jadi peran masyarakatlah yang dominan untuk meningkatkan keamanan. Jadi jika terjadi masalah politik, eko-

nomi sosial, budaya dapat di minimalisir bahkan dilokalisir.

Berdasarkan perbandingan KKI, Polmas jelas beda dengan Binmas (bimbingan masyarakat) atau Siskamswakarsa dengan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pendekatannya cenderung pada struktur kekuasaan sekalipun masyarakat dijadikan ujung tombak. Artinya, dinamika perkembangan masyarakat tidak tumbuh dari masyarakat itu sendiri melainkan dipaksa oleh sang Bintara yang kedudukannya merasa lebih tinggi dari masyarakat yang dibinanya.

Kebijakan Kapolri Jenderal Sutanto tentang strategi Polmas ini lebih menitik beratkan pada peran masyarakat, seperti peran masyarakat Partai Politik dan non partai, peran yudikatif, peran legislatif, serta peran pengambil kebijakan tingkat Propinsi untuk menjadi mitra Polmas dengan menggelar kordinasi kemudian menginventarisasi permasalahan di tingkat provinsi untuk membangun persepsi.

Strategi Kapolri ini lebih mengedepankan langkah-langkah pre-emptif dan preventif. Hendaknya setiap permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat secara dini dapat di deteksi dan diselesaikan, agar tidak berkembang menjadi lebih besar, imbasnya mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat.

Gangguan keamanan yang ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku-dilaksanakan secara tegas, konsisten, obyektif menjunjung tinggi HAM arahnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

Polmas sebagai perwujudan program *Community Policing* ini lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam mengamankan diri dan lingkungannya serta meneliminir sekaligus menyelesaikan masalah di masyarakat.

Program ini sekaligus dibarengi dengan kehadiran petugas Polri di

tengah masyarakat dengan cepat tujuannya untuk mencegah gangguan kamtibmas- imbasnya mewujudkan ketentraman dengan basis masyarakat patuh hukum.

Terobosan Polmas ini, Kapolri diharapkan dapat merubah paradigma penempatan personel Polmas yang berprestasi dan memiliki integritas dan memiliki moral yang tinggi menduduki jabatan promosi. Paradigma ini memupus anggapan yang selama ini personel Biro Bimmas adalah buangan.

Untuk melaksanakan ada beberapa tahapan dalam Polmas yaitu program lima tahun, sosialisasi, visualisasi serta publikasi termasuk informasi Polmas dalam Website, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan pembangunan prasarana.

Selain merekrut 70.000 personil Polri dalam kurun lima tahun, program Polmas ini juga merekrut 14.000 per tahun anggota masyarakat yang mengawaki FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) dari kelurahan atau desa diseluruh Indonesia. Mereka nantinya dilengkapi prasarana sesuai dengan kondisi daerah setempat.

Langkah terobosan Kapolri dalam program ini, personil Polri yang melaksanakan misi ini disediakan tempat tinggal di desa atau kelurahan. Penyediaan prasarana dan sarana erat kaitanya pendekatan dengan warga masyarakat setempat sehingga personil Polri langsung berbaur dan menyatu dengan kehidupan warga masyarakat.

Implementasi Polmas dalam program lima tahunnya ini harus diukur dengan indikator keberhasilan, efektifitas sejauh mana masyarakat dapat merasakan Polmas. Akan halnya efisiensi penggunaan dana secara tepat untuk meningkatkan kualitas tata kelola di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Disamping itu, ekuualitas kesetaraan status dan peran dalam penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian. \*\*\*